



Kartu Raskin Nontunai Belum Didistribusikan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah pusat menerapkan uji coba beras miskin (raskin) nontunai di Kota Yogyakarta mulai tahun 2017. Namun sampai kemarin Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengakses bantuan itu belum didistribusikan ke daerah. Pemerintah pusat menjanjikan Januari 2017 program raskin nontunai sudah berjalan.

"Janjinya di Januari sudah jalan. Tapi sampai sekarang kartunya belum didistribusikan," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Hadi Muhtar, Senin (2/1).

Dia menyampaikan KKS untuk mengakses raskin nontunai akan didistribusikan pemerintah pusat melalui Dinsosnakertrans, lalu diserahkan ke keluarga penerima ras-

kin. Data terakhir penerima raskin di Kota Yogyakarta sebanyak 16.031 Kepala Keluarga (KK). Jumlah itu berdasarkan survei BPS tahun 2011.

"Kami sudah serahkan data penerima itu ke pusat. Kewenangan mencetak kartu di pemerintah pusat, jadi kami menunggu saja," ucapnya.

Dia menjelaskan jika ada perubahan data calon penerima raskin nontunai tetap dilakukan melalui musya-

warah kelurahan. Hanya bagi penerima yang meninggal, penggantian prioritas dari keluarga terkait misal anaknya. Proses penggantian kartu calon penerima raskin nontunai diupayakan cepat karena akan ada sistem data yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

"Kita diberikan kewenangan untuk membuka sistem data, dan mengusulkan penggantian data. Namun tetap yang mencetak kartunya di pusat," papar Hadi.

Selama ini raskin diberikan berupa beras dengan uang tebusan tertentu. Raskin nontunai diberikan senilai Rp 110.000/bulan dalam simpanan rekening bank yang diakses dengan KKS. Kartu itu bisa untuk membeli beras maupun kebutuhan lainnya melalui

layanan elektronik warung (e-warong) Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). Penggunaan KKS di e-warong dilakukan dengan menggesek kartu pada alat Electronic Data Capture (EDC).

Rencananya satu kecamatan ada satu e-warong, kecuali Umbulharjo ada dua e-warong. Persiapan e-warong itu telah dilakukan. Hadi menyatakan dalam pendirian e-warong ada dana dari pusat sekitar Rp 30 juta mendukung operasional. Dana itu untuk rehabilitasi e-warong, penyediaan sarana pendukung seperti rak dan modal untuk mengambil barang kebutuhan dari Bulog.

"Saat ini sedang proses pengajuan dana itu," ujarnya. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005